



PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2022-2024

Aditiya Rizqi Febriansah, Siti Mutmainah¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of related party transactions on earnings management with board of commissioners characteristics as moderating variables in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022-2024 period. The characteristics of the board of commissioners are proxied by independent commissioners and board size. This study employs agency theory as the underlying theoretical framework. The sample was selected using a purposive sampling method, resulting in 179 observations. The analytical method used in this study was panel data regression analysis with the Common Effect Model and moderated regression analysis. The results indicate that related party transactions have a significant negative effect on earnings management. Independent commissioners are not proven to moderate the effect of related party transactions on earnings management. Meanwhile, board size is proven to moderate the effect of related party transactions on earnings management with a negative direction, indicating that board size weakens the positive effect of related party transactions on earnings management. These findings suggest that the monitoring capacity of the board of commissioners plays an important role in limiting the potential use of related party transactions in earnings management practices.

Keywords: *Related Party Transactions, Earnings Management, Independent Commissioners, Board Size.*

PENDAHULUAN

Integritas pelaporan keuangan menjadi aspek penting dalam menjaga efisiensi pasar modal karena informasi laba digunakan oleh investor dan pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Namun, fleksibilitas dalam sistem akuntansi berbasis akrual memberikan ruang bagi manajemen untuk menggunakan diskresi dalam pelaporan keuangan sehingga memunculkan praktik manajemen laba (*earnings management*) yang berpotensi menurunkan kualitas informasi keuangan (Healy & Wahlen, 1999; Dechow *et al.*, 2010).

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, risiko manajemen laba menjadi lebih tinggi karena struktur kepemilikan yang terkonsentrasi meningkatkan potensi konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas (Claessens *et al.*, 1999; Shleifer & Vishny, 1997). Salah satu mekanisme yang sering dikaitkan dengan konflik tersebut adalah transaksi pihak berelasi (*related party transactions*/RPT). Transaksi pihak berelasi dapat berperan sebagai sarana efisiensi melalui pengurangan biaya transaksi dan optimalisasi sumber daya dalam kelompok usaha, namun juga berpotensi digunakan secara oportunistik untuk melakukan *tunneling*, *propping*,

¹ Corresponding author

maupun pengaturan laba yang dilaporkan (Gordon *et al.*, 2004; Jian & Wong, 2010; Nekhili & Cherif, 2011).

Penelitian terdahulu mengenai hubungan transaksi pihak berelasi dan manajemen laba masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Subastian *et al.* (2021) menemukan pengaruh positif transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba, sedangkan El-Helaly *et al.* (2018) menemukan hubungan negatif yang mengindikasikan adanya efek substitusi. Di sisi lain, Wijaya (2014) tidak menemukan hubungan yang signifikan. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara transaksi pihak berelasi dan manajemen laba kemungkinan dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan.

Berdasarkan *agency theory*, dewan komisaris berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen maupun pemegang saham pengendali (Jensen & Meckling, 1976). Dalam sistem *two-tier board* yang berlaku di Indonesia, efektivitas fungsi pengawasan tersebut dapat tercermin melalui karakteristik dewan komisaris, khususnya komisaris independen dan ukuran dewan komisaris. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dewan dapat memengaruhi hubungan antara transaksi pihak berelasi dan manajemen laba (Gavana *et al.*, 2024; Ramadhan & Bandiyono, 2024), bukti empiris pada perusahaan manufaktur Indonesia masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba serta menguji peran moderasi komisaris independen dan ukuran dewan komisaris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai transaksi pihak berelasi, manajemen laba, dan tata kelola perusahaan dalam konteks negara berkembang.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

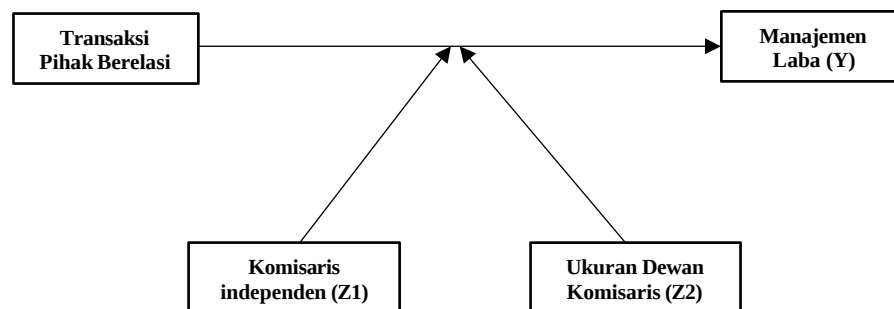
Agency theory menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan karena manajemen memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Kondisi asimetri informasi tersebut memberikan peluang bagi pihak internal untuk bertindak oportunistik guna memaksimalkan kepentingannya sendiri, termasuk melalui praktik manajemen laba. Dalam konteks negara berkembang yang umumnya memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi, konflik keagenan tidak hanya terjadi antara manajer dan pemegang saham, tetapi juga antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas (Young *et al.*, 2008). Salah satu mekanisme yang berpotensi memunculkan konflik tersebut adalah transaksi pihak berelasi, karena transaksi ini dapat digunakan baik untuk tujuan efisiensi maupun untuk mengalihkan manfaat ekonomi kepada pihak tertentu (Gordon *et al.*, 2004).

Dalam perspektif teori keagenan, efektivitas mekanisme pengawasan menjadi faktor penting dalam membatasi perilaku oportunistik yang timbul melalui transaksi pihak berelasi. Transaksi tersebut berpotensi memengaruhi pelaporan keuangan melalui pengaturan pengakuan pendapatan, beban, maupun transaksi lainnya yang berdampak pada laba yang dilaporkan (Nekhili & Cherif, 2011). Oleh karena itu, dewan komisaris berperan sebagai mekanisme monitoring untuk mengawasi tindakan manajemen dan melindungi kepentingan pemegang saham. Efektivitas pengawasan tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh karakteristik dewan, khususnya komisaris independen dan ukuran dewan komisaris, yang dapat menentukan kuat atau lemahnya pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada *Agency Theory* yang menempatkan transaksi pihak berelasi sebagai salah satu sumber potensial konflik keagenan dan perilaku oportunistik dalam perusahaan. Transaksi pihak berelasi dapat digunakan untuk tujuan efisiensi ekonomi, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk memengaruhi pelaporan keuangan melalui praktik manajemen laba. Hubungan tersebut diperkirakan tidak hanya ditentukan oleh karakteristik transaksi itu sendiri, melainkan juga oleh efektivitas mekanisme pengawasan perusahaan. Dalam penelitian ini, komisaris independen dan ukuran dewan komisaris dipandang sebagai karakteristik tata kelola yang berperan dalam membatasi atau memperkuat pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan kerangka pemikiran yang mengintegrasikan transaksi pihak berelasi dan karakteristik dewan komisaris untuk menjelaskan variasi praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Manajemen Laba

Agency theory menjelaskan bahwa asimetri informasi dan konflik kepentingan antara pihak internal perusahaan dan pemegang saham dapat mendorong munculnya perilaku oportunistik dalam pelaporan keuangan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, transaksi pihak berelasi (*related party transactions*) menjadi salah satu mekanisme yang berpotensi digunakan untuk mengalihkan manfaat ekonomi kepada pihak tertentu atau memengaruhi pelaporan keuangan perusahaan. Meskipun transaksi pihak berelasi dapat dilakukan untuk tujuan efisiensi, transaksi tersebut juga berpotensi dimanfaatkan secara oportunistik melalui pengaturan harga, pengakuan pendapatan, maupun pengakuan beban yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya (Gordon *et al.*, 2004; Nekhili & Cherif, 2011).

Sejumlah penelitian menemukan bahwa transaksi pihak berelasi dapat meningkatkan praktik manajemen laba karena memberikan fleksibilitas bagi pihak internal untuk memengaruhi laba yang dilaporkan. Subastian *et al.* (2021) menemukan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sementara Chen *et al.* (2011) menunjukkan bahwa intensitas transaksi pihak berelasi berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan perusahaan melakukan manipulasi pelaporan keuangan. Berdasarkan argumentasi teoritis dan bukti empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Peran Moderasi Komisaris Independen pada Hubungan Transaksi Pihak Berelasi dan Manajemen Laba

Dalam perspektif *agency theory*, komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan yang bertugas mengurangi konflik kepentingan dan membatasi perilaku oportunistik manajemen maupun pemegang saham pengendali (Jensen & Meckling, 1976). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan objektivitas pengawasan karena tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali. Dalam konteks transaksi pihak berelasi, komisaris independen memiliki peran penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan berlangsung secara wajar, transparan, dan tidak digunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

Pengawasan yang lebih efektif dari komisaris independen diperkirakan dapat membatasi pemanfaatan transaksi pihak berelasi sebagai sarana untuk memengaruhi laba yang dilaporkan. Dengan demikian, semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin rendah peluang transaksi pihak berelasi digunakan untuk tujuan oportunistik yang berkaitan dengan manajemen laba. Temuan Ramadhan dan Bandiyono (2024) menunjukkan bahwa komisaris independen mampu memperlemah pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba melalui peningkatan efektivitas fungsi monitoring perusahaan. Berdasarkan argumentasi teoritis dan bukti empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komisaris independen memperlemah pengaruh positif transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba.

Peran Moderasi Ukuran Dewan Komisaris pada Hubungan Transaksi Pihak Berelasi dan Manajemen Laba

Agency theory menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan yang efektif diperlukan untuk mengurangi konflik kepentingan dan membatasi perilaku oportunistik dalam perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu karakteristik yang mencerminkan kapasitas pengawasan dewan adalah ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris yang lebih besar umumnya memiliki keragaman keahlian, pengalaman, dan perspektif yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap keputusan dan transaksi perusahaan. Dalam konteks transaksi pihak berelasi, ukuran dewan komisaris yang memadai dapat meningkatkan kemampuan dewan dalam mengevaluasi kewajaran transaksi serta mengidentifikasi potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan maupun pemegang saham minoritas.

Peningkatan kapasitas monitoring tersebut diperkirakan dapat membatasi penggunaan transaksi pihak berelasi untuk tujuan oportunistik, termasuk praktik manajemen laba. Dengan pengawasan yang lebih kuat, peluang manajemen maupun pemegang saham pengendali untuk memanfaatkan transaksi pihak berelasi sebagai sarana memengaruhi laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Gavana *et al.* (2024) menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan mampu mengurangi dampak oportunistik transaksi pihak berelasi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan argumentasi teoritis dan bukti empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran dewan komisaris memperlemah pengaruh positif transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022-2024
2. Perusahaan yang memiliki laba positif dan memiliki informasi yang diperlukan untuk menghitung variabel transaksi pihak berelasi. selama periode penelitian.
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah sebagai satuan mata uang dalam laporan keuangan.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 179 observasi perusahaan-tahun yang memenuhi persyaratan penelitian dan digunakan dalam analisis. Data penelitian diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan masing-masing perusahaan.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba (*earnings management*), yaitu tindakan manajemen dalam menggunakan diskresi akuntansi untuk memengaruhi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Healy & Wahlen, 1999). Manajemen laba diukur menggunakan *discretionary accruals* yang diperoleh melalui *Modified Jones Model* yang dikembangkan oleh Dechow *et al.* (1995). Model ini merupakan pengembangan dari Jones Model (1991) dan banyak digunakan dalam penelitian akuntansi karena mampu mengendalikan potensi manipulasi pendapatan melalui piutang usaha. Nilai *discretionary accruals* digunakan sebagai proksi manajemen laba, di mana semakin besar nilai *discretionary accruals* menunjukkan semakin tinggi tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Pengukuran manajemen laba dilakukan melalui tahapan perhitungan *Modified Jones Model* sebagai berikut:

1. *Total Accrual*

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

2. *Total Accrual* dengan menggunakan *Ordinary Least Square*

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \epsilon$$

3. *Nondiscretionary Total Accrual (NDA)*

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

4. *Discretionary Accrual (DA)*

$$DA_{it} = \frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} - NDA_{it}$$

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah transaksi pihak berelasi (*related party transactions*). Transaksi pihak berelasi merupakan pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara perusahaan dan pihak yang memiliki hubungan istimewa (PSAK 224). Pengukuran transaksi pihak berelasi menggunakan intensitas transaksi operasional pihak berelasi, yang dihitung sebagai total pembelian dari pihak berelasi dan total penjualan kepada pihak berelasi yang kemudian diskalakan dengan total pendapatan perusahaan. Proksi ini dipilih karena transaksi operasional pihak berelasi merupakan bentuk transaksi yang paling berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan dan memiliki potensi untuk memengaruhi pelaporan laba melalui pengaturan pendapatan maupun beban (Gavana *et al.*, 2024). Semakin tinggi nilai rasio tersebut menunjukkan semakin besar intensitas transaksi pihak berelasi yang dilakukan perusahaan.

$$TPB = \frac{\text{Pembelian TPB} + \text{Penjualan TPB}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Variabel Moderasi

1. Komisaris Independen

Variabel moderasi pertama dalam penelitian ini adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali sehingga diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Variabel ini diukur menggunakan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris. Pengukuran tersebut mengacu pada Wicaksono dan Chariri (2015), di mana proporsi komisaris independen mencerminkan tingkat independensi dewan dalam menjalankan fungsi monitoring perusahaan.

2. Ukuran Dewan Komisaris

Variabel moderasi kedua dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan pada akhir periode pelaporan. Ukuran dewan komisaris mencerminkan kapasitas pengawasan yang dimiliki perusahaan, di mana jumlah anggota yang lebih besar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring melalui keberagaman keahlian, pengalaman, dan perspektif dalam proses pengambilan keputusan.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba serta peran moderasi komisaris independen dan ukuran dewan komisaris. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak *EViews 14*. Penggunaan MRA dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah karakteristik dewan komisaris mampu memoderasi hubungan antara transaksi pihak berelasi dan manajemen laba. Pengujian dilakukan melalui satu model pengaruh langsung dan dua model interaksi moderasi.

$$EMit = \alpha + \beta_1 TPBit + \varepsilon it \dots (\text{Model 1})$$

$$EMit = \alpha + \beta_1 TPBit + \beta_2 Klit + \beta_3 (TPBit \times Klit) + \varepsilon it \dots (\text{Model 2})$$

$$EMit = \alpha + \beta_1 TPBit + \beta_2 UDKit + \beta_3 (TPBit \times UDKit) + \varepsilon it \dots (\text{Model 3})$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Berdasarkan klasifikasi IDX *Industrial Classification* (IDX-IC), perusahaan manufaktur dalam penelitian ini mencakup sektor *Basic Materials*, *Industrials*, *Consumer Non-Cyclicals*, *Consumer Cyclicals*, dan *Healthcare* yang memiliki aktivitas utama berupa pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap, mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mengukur transaksi pihak berelasi, serta menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan keuangan. Dari total 345 observasi awal selama periode 2022-2024, sebanyak 109 observasi dikeluarkan karena perusahaan mengalami laba negatif atau tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel penelitian, sedangkan 57 observasi lainnya dieliminasi karena menggunakan mata uang selain rupiah dalam laporan keuangan. Dengan demikian, diperoleh 179 observasi perusahaan-tahun yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel penelitian.

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
Transaksi Pihak Berelasi	179	0,00019	1,53907	0,22370	0,27318
Komisaris Independen	179	0,25	0,83	0,42	0,11
Manajemen Laba	179	-0,10676	0,11900	0,00420	0,02236
Variabel	N	Minimum	Maximum	Modus	Std. Dev
Ukuran Dewan Komisaris	179	2	9	3	1,65

Sumber: Output EVIEWS 14, 2026

Tabel 1 menyajikan hasil statistik deskriptif variabel penelitian. Variabel transaksi pihak berelasi memiliki nilai rata-rata sebesar 0,22370 dengan nilai minimum 0,00019 dan maksimum 1,53907. Nilai tersebut menunjukkan bahwa intensitas transaksi pihak berelasi pada perusahaan sampel relatif bervariasi, yang tercermin dari nilai standar deviasi sebesar 0,27318 yang lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya. Variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,42, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata proporsi komisaris independen telah memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan regulator. Selain itu, nilai standar deviasi yang relatif rendah sebesar 0,11 mengindikasikan bahwa proporsi komisaris independen antarperusahaan cenderung homogen.

Variabel manajemen laba memiliki nilai rata-rata sebesar 0,00420 dengan rentang nilai antara -0,10676 hingga 0,11900. Nilai rata-rata yang mendekati nol menunjukkan bahwa secara umum tingkat manajemen laba pada perusahaan sampel relatif rendah. Sementara itu, ukuran dewan komisaris memiliki jumlah anggota antara 2 hingga 9 orang dengan modus sebesar 3 dan standar deviasi 1,65, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki dewan komisaris beranggotakan tiga orang, meskipun terdapat variasi ukuran dewan antarperusahaan. Secara keseluruhan, variabel komisaris independen menunjukkan distribusi yang relatif stabil, sedangkan transaksi pihak berelasi dan ukuran dewan komisaris memiliki tingkat variasi yang lebih tinggi.

Uji Pemilihan Model Data Panel

Tabel 2
Hasil Uji Pemilihan Model Data Panel

	Uji Chow	Uji Hausman	Uji LM	Model Terpilih
	Prob.F			
Model 1	0,011	0,116	0,579	CEM
Model 2	0,006	0,274	0,533	CEM
Model 3	0,094	0,047	0,275	CEM

Sumber: Output EVIEWS 14, 2026

Berdasarkan hasil uji pemilihan model data panel pada Tabel 2, seluruh model penelitian menggunakan *Common Effect Model* (CEM). Meskipun Uji Chow pada Model 1 dan Model 2 menunjukkan probabilitas di bawah 0,05, hasil Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) menghasilkan nilai probabilitas di atas 0,05 sehingga tidak terdapat bukti yang cukup untuk memilih *Fixed Effect Model* (FEM) maupun *Random Effect Model* (REM). Oleh karena itu, *Common Effect Model* (CEM) dipilih sebagai model yang paling sesuai untuk digunakan dalam pengujian hipotesis pada ketiga model penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

	Jarque-Bera	
Model	Probability	Keterangan
Model 1	0,000	Tidak Normal
Model 2	0,000	Tidak Normal
Model 3	0,000	Tidak Normal

Sumber: Output EVIEWS 14, 2026

Hasil uji Jarque-Bera menunjukkan bahwa residual pada seluruh model penelitian tidak berdistribusi normal ($p\text{-value} < 0,05$). Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi validitas hasil analisis karena jumlah observasi yang digunakan relatif besar (179 observasi). Sesuai dengan *Central Limit Theorem*, distribusi estimator koefisien regresi akan mendekati normal pada sampel yang besar sehingga pengujian statistik, seperti uji t dan uji F, tetap dapat dilakukan secara andal meskipun residual tidak berdistribusi normal (Lumley *et al.*, 2002; Kwak & Kim, 2017).

Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Model 2	Transaksi Pihak Berelasi	0,858	1,165	Tidak terjadi Multikolinearitas



Model	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Model 2	Transaksi Pihak Berelasi	0,858	1,165	Tidak terjadi Multikolinearitas
	Komisaris Independen	0,984	1,016	Tidak terjadi Multikolinearitas
	Transaksi Pihak Berelasi x Komisaris Independen	0,868	1,152	Tidak terjadi Multikolinearitas
Model 3	Transaksi Pihak Berelasi	0,703	1,422	Tidak terjadi Multikolinearitas
	Ukuran Dewan Komisaris	0,986	1,014	Tidak terjadi Multikolinearitas
	Transaksi Pihak Berelasi x Ukuran Dewan Komisaris	0,708	1,412	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Output EVIEWS 14, 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dan moderasi memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10. Dengan demikian, model penelitian tidak mengalami masalah multikolinearitas sehingga variabel yang digunakan dapat dianalisis lebih lanjut. Pengujian multikolinearitas tidak dilakukan pada model pengaruh langsung karena model tersebut hanya menggunakan satu variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Prob. Chi Square	Keterangan
Model 1	0,209	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Model 2	0,243	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Model 3	0,636	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output EVIEWS 14, 2026

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Breusch-Pagan-Godfrey menunjukkan bahwa seluruh model penelitian memiliki nilai probabilitas di atas tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas sehingga varians residual dapat dianggap konstan (homoskedastis) dan model penelitian memenuhi asumsi yang diperlukan untuk analisis regresi data panel.

Uji Autokorelasi

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Prob. Chi Square
Model 1	0,990
Model 2	0,988
Model 3	0,121

Sumber: Output EVIEWS 14, 2026

Hasil uji autokorelasi menggunakan Breusch-Godfrey *Serial Correlation LM Test* menunjukkan bahwa seluruh model penelitian memiliki nilai probabilitas di atas tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, tidak terdapat gejala autokorelasi pada model penelitian sehingga residual antarobservasi dapat dianggap saling independen.

Uji Regresi & MRA

Tabel 7 di bawah ini menyajikan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2), uji simultan (uji F), serta pengujian hipotesis untuk seluruh model regresi yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Model 1 (EM)	Model 2 (EM)	Model 3 (EM)
TPB	-0,012 (0,048)	0,001 (0,972)	0,044 (0,019)
KI	-	-0,000 (0,623)	-
UDK	-	-	-0,000 (0,952)
TPB x KI	-	-0,364 (0,631)	-
TPB x UDK	-	-	-0,016 (0,001)
R^2	0,016	0,011	0,098
Prob > F	0,048	0,165	0,000

Sumber: Output EVIEWS 14, 2026

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa Model 1 memiliki nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,016 dengan nilai Prob > F sebesar 0,048, yang menunjukkan bahwa model signifikan dalam menjelaskan pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba. Model 2 menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,011 dengan nilai Prob > F sebesar 0,165, sehingga model tidak signifikan secara keseluruhan. Sementara itu, Model 3 memiliki nilai R^2 sebesar 0,098 dengan nilai Prob > F sebesar 0,000, yang menunjukkan bahwa model signifikan dan memiliki kemampuan penjelasan yang lebih baik dibandingkan model lainnya. Hasil uji t menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba pada Model 1, komisaris independen tidak memoderasi hubungan antara transaksi pihak berelasi dan manajemen laba pada Model 2, sedangkan ukuran dewan komisaris terbukti memperlemah pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba pada Model 3.

Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Manajemen Laba

Hasil pengujian menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan transaksi pihak berelasi justru diikuti oleh penurunan praktik manajemen laba akrual. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang memprediksi pengaruh positif transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba **tidak diterima**.

Dalam perspektif *Agency Theory*, transaksi pihak berelasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kendali untuk memperoleh manfaat pribadi melalui pengalihan sumber daya atau pengaturan transaksi tertentu (Jensen & Meckling, 1976; Young *et al.*, 2008). Oleh karena itu, penelitian ini awalnya memprediksi bahwa transaksi pihak berelasi akan meningkatkan manajemen laba. Namun, hasil yang diperoleh menunjukkan arah yang berbeda. Temuan ini dapat dijelaskan oleh pandangan Gordon *et al.* (2004) yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi tidak selalu mencerminkan *conflict of interest*, tetapi juga dapat berfungsi sebagai *efficient transactions* yang mendukung efisiensi operasional, mengurangi biaya transaksi, dan

memperkuat koordinasi antarentitas dalam kelompok usaha. Dengan demikian, peningkatan transaksi pihak berelasi tidak selalu diikuti oleh peningkatan manajemen laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Alhadab *et al.* (2020) dan El-Helaly *et al.* (2018) yang menemukan bahwa transaksi pihak berelasi berhubungan negatif dengan manajemen laba. El-Helaly *et al.* (2018) menjelaskan bahwa transaksi pihak berelasi dapat berperan sebagai mekanisme alternatif (*substitute mechanism*) dibandingkan manajemen laba akrual dalam mencapai tujuan tertentu. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Chen *et al.* (2011), Jian dan Wong (2010), serta Subastian *et al.* (2021) yang menemukan bahwa transaksi pihak berelasi cenderung meningkatkan praktik manajemen laba. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan karakteristik sampel, lingkungan kelembagaan, periode pengamatan, serta jenis transaksi pihak berelasi yang digunakan dalam masing-masing penelitian.

Komisaris Independen Memperlemah Hubungan Positif Transaksi Pihak Berelasi terhadap Manajemen Laba

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi antara transaksi pihak berelasi dan komisaris independen memiliki koefisien negatif, namun tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak terbukti memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa komisaris independen memperlemah pengaruh positif transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba **tidak diterima**.

Dalam perspektif *Agency Theory*, komisaris independen berperan sebagai mekanisme monitoring yang diharapkan mampu mengurangi konflik kepentingan dan membatasi perilaku oportunistik manajemen maupun pemegang saham pengendali (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen seharusnya dapat meningkatkan pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi dan mengurangi peluang penggunaannya untuk tujuan manajemen laba. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum tentu mencerminkan efektivitas pengawasan yang sesungguhnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa fungsi komisaris independen kemungkinan masih bersifat formal untuk memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan, sementara efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kompetensi, independensi substantif, akses informasi, serta kemampuan memahami kompleksitas transaksi pihak berelasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Abdullah *et al.* (2020) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba, serta Grada dan Sharma (2022) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak selalu efektif dalam membatasi praktik manajemen laba. Sebaliknya, temuan ini tidak sejalan dengan Lo *et al.* (2010) dan Ramadhan dan Bandiyono (2024) yang menemukan bahwa keberadaan anggota dewan independen mampu memperkuat fungsi pengawasan dan membatasi dampak oportunistik transaksi pihak berelasi. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik sampel, struktur kepemilikan perusahaan, lingkungan tata kelola, dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan pada masing-masing konteks penelitian.

Ukuran Dewan Komisaris Memperlemah Hubungan Positif Transaksi Pihak Berelasi terhadap Manajemen Laba

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi antara transaksi pihak berelasi dan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memperlemah pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) **diterima**.

Dalam perspektif *Agency Theory*, dewan komisaris berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang bertugas mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pihak yang mengelola perusahaan dan pemegang saham (Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Ukuran dewan komisaris yang lebih besar memungkinkan perusahaan memiliki sumber daya pengawasan yang lebih memadai melalui keberagaman pengalaman, keahlian, dan perspektif dalam mengevaluasi keputusan manajemen. Dalam konteks transaksi pihak berelasi, kapasitas pengawasan yang lebih besar dapat meningkatkan kemampuan dewan dalam menilai kewajaran transaksi, mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, serta membatasi penggunaan transaksi pihak berelasi yang berpotensi memengaruhi laba yang dilaporkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Pandey dan Pattanayak (2022), Marchini *et al.* (2018), serta Gavana *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih efektif mampu membatasi dampak oportunistik transaksi pihak berelasi dan praktik manajemen laba. Namun demikian, temuan ini berbeda dengan Yermack (1996), Grada (2022), dan Shira (2025) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan yang lebih besar tidak selalu meningkatkan efektivitas pengawasan dan dalam kondisi tertentu justru dapat berkaitan dengan peningkatan manajemen laba. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas ukuran dewan komisaris tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota dewan, tetapi juga oleh kualitas, koordinasi, serta kemampuan anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam penelitian ini, ukuran dewan komisaris terbukti berperan sebagai mekanisme monitoring yang mampu memperlemah pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

KESIMPULAN & KETERBATASAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba serta peran moderasi komisaris independen dan ukuran dewan komisaris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis pertama tidak diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur tidak selalu digunakan sebagai sarana perilaku oportunistik, tetapi juga dapat mencerminkan aktivitas bisnis yang bertujuan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, komisaris independen tidak terbukti memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis kedua tidak diterima.

Di sisi lain, ukuran dewan komisaris terbukti memperlemah pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pengawasan yang lebih besar dapat meningkatkan efektivitas monitoring terhadap transaksi pihak berelasi dan membatasi potensi penggunaannya untuk tujuan oportunistik. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengendalikan risiko transaksi pihak berelasi lebih tercermin pada kapasitas pengawasan dewan komisaris dibandingkan pada keberadaan komisaris independen semata.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketersediaan data transaksi pihak berelasi. Dari 345 observasi awal, hanya 179 observasi yang memenuhi kriteria penelitian, sedangkan 166 observasi (48,12%) tidak dapat digunakan karena keterbatasan pengungkapan informasi transaksi pihak berelasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keterbatasan cakupan sampel yang digunakan.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pengukuran transaksi pihak berelasi yang lebih rinci dengan memisahkan jenis transaksi, seperti penjualan, pembelian, piutang, utang, aset, dan liabilitas, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai jenis transaksi yang paling berkaitan dengan praktik manajemen laba. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas pengukuran karakteristik dewan komisaris dengan menambahkan proksi lain, seperti keahlian, pengalaman, frekuensi rapat, tingkat kehadiran, dan masa jabatan dewan komisaris, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas fungsi pengawasan dalam membatasi perilaku oportunistik melalui transaksi pihak berelasi.

REFERENSI

- Abdullah, M. W., Hermawan, H., & Bayan, A. Y. M. (2020). Interaction of independent commissioners against earning management determinants. *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*, 7(4), 39–51. <https://doi.org/10.29121/ijetmr.v7.i4.2020.573>
- Alhadab, M., Clacher, I., & Keasey, K. (2020). Related party transactions and earnings management in Jordan: The influence of audit quality. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 16(3), 245–264.
- Chen, J. J., Cheng, P., & Xiao, X. (2011). Related party transactions as a source of earnings management. *Applied Financial Economics*, 21(3), 165–181. <https://doi.org/10.1080/09603107.2010.528361>
- Claessens, S., Djankov, S., Fan, J. P. H., & Lang, L. H. P. (1999). The separation of ownership and control in East Asian corporations. *Journal of Financial Economics*, 58(1–2), 81–112. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00067-2](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00067-2)
- Dechow, P. M., Ge, W., & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 344–401. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.001>
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. *The Accounting Review*, 70(2), 193–225. <http://www.jstor.org/stable/248303>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325. <https://doi.org/10.1086/467037>
- Gavana, G., Gottardo, P., & Moiselto, A. M. (2024). Related party transactions and earnings management in family firms: the moderating role of board characteristics characteristics. *Journal of Family Business Management*, 14(1), 171–198. <https://doi.org/10.1108/JFBM-07-2022-0090>
- Gordon, E. A., Henry, E., & Palia, D. (2004). Related party transactions and corporate governance. *Advances in Financial Economics*, 9, 1–27. [https://doi.org/10.1016/S1569-3732\(04\)09001-2](https://doi.org/10.1016/S1569-3732(04)09001-2)
- Grada, M., & Sharma, R. (2022). Board characteristics and earnings management: Evidence from emerging markets. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 12(4), 615–644.
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383. <https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jian, M., & Wong, T. J. (2010). Propping through related party transactions. *Review of Accounting Studies*, 15(1), 70–105.



- Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. *Journal of Accounting Research*, 29(2), 193–228. <https://doi.org/10.2307/2491047>
- Kwak, S. G., & Kim, J. H. (2017). Central limit theorem: The cornerstone of modern statistics. *Korean Journal of Anesthesiology*, 70(2), 144–156. <https://doi.org/10.4097/kjae.2017.70.2.144>
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: An empirical analysis of the transfer pricing behavior of Chinese-listed companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1–26. <https://doi.org/10.2308/jata.2010.32.2.1>
- Lumley, T., Diehr, P., Emerson, S., & Chen, L. (2002). The importance of the normality assumption in large public health data sets. *Annual Review of Public Health*, 23, 151–169. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.23.100901.140546>
- Marchini, P. L., Mazza, T., & Medioli, A. (2018). Related party transactions, corporate governance, and earnings management. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 18(6), 1124–1146. <https://doi.org/10.1108/CG-11-2017-0271>
- Nekhili, M., & Cherif, M. (2011). Related parties transactions and firm's market value: The French case. *Review of Accounting and Finance*, 10(3), 291–315. <https://doi.org/10.1108/14757701111155806>
- Pandey, A., & Pattanayak, J. K. (2022). Role of corporate governance in constraining earnings management practices : a study of select Indian and Chinese firms. *Journal of Indian Business*. 14(3), 231–250.
- Ramadhan, R., Bandiyono, A., & Pajak, D. J. (2024). The effect of related party transactions, tax planning, and leverage moderated by independent commissioners on earnings. *Journal Eduvest*, 4(8), 2104–2112.
- Shira, R. K. (2025). Corporate governance, competition and earnings management: evidence from Asian emerging economies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 23 (1), 218-234. <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2022-0270>.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. *The Journal of Finance*, 52(2), 737–783. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x>
- Subastian, L. U., Widagdo, A. K., & Setiawan, D. (2021). Related party transactions, family ownership, and earnings management in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(3), 688–700. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i3.5778>
- Wicaksono, A., & Chariri, A. (2015). Mekanisme corporate governance dan praktik manajemen laba pada perusahaan publik di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–12.
- Wijaya, C. (2014). Hubungan transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI selain sektor keuangan periode 2010–2012.
- Yermack, D. (1996). Higher market valuation of companies with a small board of directors. *Journal of Financial Economics*, 40(s2), 185–211. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(9s5\)00844-5](https://doi.org/10.1016/0304-405X(9s5)00844-5)
- Young, M. N., Peng, M. W., Ahlstrom, D., Bruton, G. D., & Jiang, Y. (2008). Corporate governance in emerging economies: A review of the principal–principal perspective. *Journal of Management Studies*, 45(1), 196–220. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00752.x>